BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin strategis, terutama dalam mengembangkan kehidupan demokratis.

Dengan hadirnya UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kehadiran undang-undang tersebut telah menampilkan paradigma baru tentang pengaturan dunia penyiaran di Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat sebagai pemberi izin penyiaran yang ada di Daerah Jawa Barat baik penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas, dan berlanggan belum memiliki sistem informasi pendukung yang efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberi izin. Sistem yang berjalan ini mengharuskan lembaga yang akan mengajukan perizinan harus mendatangi langsung kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

(KPID) Jawa Barat. Disisi lain, hal ini menyebabkan menjadi tidak efektif dan efisiennya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perizinan.

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2010, lembaga yang mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ada sebanyak 1027 lembaga. Secara garis besar, jumlah tersebut dikelompokan lagi kedalam empat jenis lembaga yaitu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Berlanggan (LPB) seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Tahun	LPS	LPK	LPP	LPB	Jumlah
2005	291	41	11	0	343
2006	105	133	3	3	244
2007	57	80	1	6	144
2008	66	44	1	2	113
2009	70	53	2	3	128
2010	26	23	2	4	55
Total					**1027**

Dari data tersebut akan lebih praktis jika proses pengajuan izin penyiaran dapat dilakukan secara online. Karena selain dapat mempermudah lembaga yang akan mengajukan perizinan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa

Barat juga dapat menginformasikan kepada lembaga pemohon tata cara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses perizinan.

Website yang saaat ini dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat belum menjadi website sistem informasi penyiaran, dikarenakan website yang ada saat ini hanya menampilkan berita seputar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dan masalah seputar penyiaran saja.

Dengan adanya perubahan menjadi website sistem informasi, hal tersebut diharapkan dapat mempermudah lembaga yang akan mengajukan ataupun memperpanjang perizinan, karena lembaga tersebut tidak harus mendatangi langsung kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, apalagi jika lokasi lembaga yang akan mengajukan ataupun memperpanjang perizinan berada di luar kota atau di luar daerah, dengan sistem informasi perizinan berbasis web ini lembaga tersebut dapat melakukan proses pengajuan ataupun perpanjangan perizinan penyiaran secara online dari tempat mereka masing-masing.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengangkat tema "Sistem Informasi Perizinan Penyiaran Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat".

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Belum efektifnya sistem informasi yang saat ini berjalan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
2. Pengajuan perizinan penyiaran masih dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
3. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat perizinan, apalagi jika lembaga pemohon berada diluar kota, hal ini dapat menyebabkan tidak efektif dan efisienya waktu dan biaya.
4. Website yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat hanya menampilkan berita dan permasalahan seputar penyiaran yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem informasi perizinan penyiaran yang saat ini berjalan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat?
2. Bagaimana perancangan sistem informasi perizinan berbasis web yang baik pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat?
3. Bagaimana implementasi sistem informasi perizinan berbasis web pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat?
4. Bagaimana evaluasi sistem informasi perizinan berbasis web pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Selain menambah wawasan bagi penulis, dengan adanya perancangan aplikasi web yang dibuat diharapkan dapat membantu lembaga yang bergerak dalam bidang perizinan penyiaran dalam menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dalam mengembangkan sistem informasi penunjang yang dapat memberikan keuntungan baik untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat maupun untuk lembaga yang mengajukan perizinan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sistem informasi perizinan penyiaran yang saat ini berjalan pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
2. Merancang sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web yang baik pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
3. Mengimplementasikan sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.
4. Mengevaluasi sistem informasi perizinan penyiaran berbasis web pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pelayanan perizinan.
2. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Dalam bidang akademis, penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bahwa sistem informasi dalam sebuah lembaga harus selalu berkembang dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan agar memudahkan kegiatan operasional lembaga.
2. Meningkatkan dan memperluas serta memanfaatkan keterampilan serta menambah pengalaman, wawasan ilmu pengetahuan, teknologi sebagai pegangan untuk memasuki dunia usaha yang akan datang.
3. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dunia kerja nyata.

1.5 BATASAN MASALAH

Pembatasan masalah yang digunakan dalam sebuah pembahasan, bertujuan agar dalam pembahasannya dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal-hal yang menjadi batasan dalam Perancangan Sistem Informasi Perizinan Penyiaran Berbasis Web ini adalah sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi ini berdasarkan metode terstruktur.
2. Penelitian ini untuk mengembangkan website Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang sudah ada sebelumnya.
3. Pengembangan yang dilakukan pada website Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yaitu penambahan fasilitas pengajuan perizinan penyiaran berbasis web pada website yang sudah ada sebelumnya.

1.6 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat
Jenis Lembaga	:	Lembaga Negara Independen
Alamat	:	Jl. Malabar No.62 Bandung
Telepon/ Fax	:	(022) 7308813/ 7308812

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penilitian selama kurang lebih empat bulan. Kegiatan yang dilakukan pada penilitian ini tampak seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Analisis kebutuhan user																
2.	Membangun prototyping																
3.	Evaluasi prototyping																
4.	Pengkodean sistem																
5.	Pengujian sistem																
6.	Evaluasi sistem																
7.	Implementasi																
8.	Dokumentasi																